

## Daftar Pustaka

### SUMBER AL-QUR'AN

*Al Quran QS Annisa/4:59*

Departemen Agama RI. 2006, *Mushaf Alquran Terjemahan*. Jakarta: Pena Pundi Aksara

### SUMBER BUKU

A.Hamid S. Attamimi. (1990) *Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I- Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Ateng S. (1991). *Titik Berat Otonomi Daerah pada Tingkat II dan Perkembangannya*. Bandung:Manda Maju.

Aziz Syamsuddin. (2011). *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang Cet. Pertama*. Jakarta:Sinar Grafika

Bagir Manan. (1995). *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung:LPPM Universitas Bandung

Bagijo, Himawan Etsu. (2009). *Pembentukan Peraturan Daerah, Drafting Proficial Regulations bahasa*.

Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Bambang Sunggono. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Hans Kelsen. (2009). *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Massachusetts,USA:Harvard University Printing Office Cambridge. Diterjemahkan Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2009)

\_\_\_\_\_. (2010). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara(Theory Of Law and State) Cet. Ke-IV* Diterjemahkan Rasul Muttakin. Bandung:Nusa Media.

\_\_\_\_\_. (1967). *Pure Theory Of Law*. Translation the second German Edition. Translated by Max Knight, Berkeley, Los Angeles, London:University of California Press. Diterjemahkan Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2009)

Huda N. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung:Nusa Media.

- \_\_\_\_\_. (2005). *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review Cet. Pertama* Yogyakarta: UII Press
- \_\_\_\_\_. (2010). *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- H.D Stout dalam Ridwan H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jimly Assiddiqie. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- \_\_\_\_\_. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat. (2006). *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum Cet. Pertama*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Maria Farida Indrati S. (2007). *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7* Yogyakarta: Kanisius
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawiasky, Hans. (1948). *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen grundbegriffe*. Cetakan kedua. Einsiedeln/Zurich/Koln: Benziger.  
Diterjemahkan Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2009)
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Philipus M. Hadjon. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Cet. Ke-10*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.
- Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surayin. (2005). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.

## **SUMBER JURNAL**

- Afandy, I. (2018). Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Perda Kabupaten/Kota Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/XIII-PUU/2015 . *Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Efendi. (2017). Hak Uji Materi Pememrintah Terhadap Peraturan Daerah (Kajian Terhadap Kewenangan Pemerintah Pusat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015). *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol 51 No. 1.
- Eka NAM Sihombing, *Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah*, Jurnal Yudisial, Vol.1, No.2, Agustus 2017.
- Fatkurohman. (2013). Implikasi Pembatalan Perda Terhadap Ketepatan Proporsi Teori Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No.1.
- Huda N. (2008). *Problematika Yuridis di Seputar Pembatalan Perda*, Jurnal Konstitusi.
- Jelic, Zoran. (1998). *A Note on Adolf Merkl's Theory of Administrative Law*, *Journal Facta Universitatis*, Series: Law and Politics. Vol. 1 No.2.
- Steward, Ian. (1990). *The Critical Legal Science of Hans Kelsen*, *Journal of Law and Society*, Vol.17, No.3
- Tesano. (2015). Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2 No. 2.
- Ziko Ostaki, Francisca R.H, Sri Handayani R.W. (2018). *Tinjauan Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol.2 No.1.

## **SUMBER SKRIPSI**

- Muh. Alfiyan Ahmad (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar*. Universitas Hasanuddin Makassar.

## **SUMBER UNDANG-UNDANG**

UUD NRI 1945 Pasal 24A ayat (1)

UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015

Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undangan Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Instrumen Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/sj pembatalan peraturan daerah melalui Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri.

### **SUMBER INTERNET**

Bagian Hukum Setda Kab.Banjar <http://jdih.banjarkab.go.id>, diakses pada 28-03-2021

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>  
diakses Rabu 8 Juni 2022

Drs. Rahmad Junaidi, S.H.,M.H. (Kepala Bagian Pengawasan Dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum SETDA Prov.Kalimantan Tengah  
<https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewenangan-pembatalan-peraturan-daerah-kabupatenkota-oleh-gubernur-ketentuan-pasal-251-ayat-2-undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah>

<http://khafidsoiality.blogspot.com/2012/01/mekanisme-pembatalan-peraturan-daerah.html.mekanisme> diakses hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022